

MEDIA

JAMKRINDO

MITRA TERPERCAYA DALAM PENJAMINAN

EDISI JULI 2020

Diterbitkan oleh Perum Jamkrindo, tidak dipertanggungjawabkan



KREDIT MODAL KERJA UMKM DIJAMIN JAMKRINDO

AGAR EKONOMI BANGKIT DI KUARTAL KETIGA

Program kredit modal kerja untuk UMKM menjadi salah satu penggerak roda perekonomian agar segera bangkit.

SEGERA SALURKAN KREDIT KE UMKM

Peresmian program penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM merupakan langkah maju dalam implementasi program PEN.



JANGAN LUPA
SUBSCRIBE DAN FOLLOW
AKUN KAMI
JAMKRINDO.CO.ID



JAMKRINDO



@PT_JAMKRINDO



JAMKRINDO



@PT_JAMKRINDO

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung :

Direksi

Penasihat :

1. Satuan Pengawas Intern
2. Seluruh Kepala Divisi

Tim Pelaksana :

A. Pimpinan Redaksi / Penanggung Jawab :

Abdul Bari

B. Redaksi :

Agustisnus Handoko

C. Editor :

1. Andre Andara
2. Lila Farikah
3. Ananda Widhia Putri

D. Bendahara :

Anzil Firdausi Nuzula

E. Desain Grafis / Fotografer :

Rully Ariefandi

H. Sirkulasi :

Rudiman

Penerbit :

Perum Jamkrindo

Alamat Redaksi

Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa B-9 Kavling 6,
Kota Baru Bandar Kemayoran,
Jakarta Pusat 10610 Indonesia.

Telp. (62-21) 6540335.

Fax. (62-21) 6540344.6540348

Website : www.jamkrindo.co.id,

E-Mail : Info@Jamkrindo.co.id



GERAK EKONOMI

PEMERINTAH sedang berpacu dengan waktu. Ekonomi nasional tidak boleh dibiarkan berlama-lama lesu dihantam pandemi Covid-19. Para pemegang kebijakan melakukan segala upaya untuk mengungkit perekonomian agar kembali merangkak naik.

Pandemi Covid-19 telah menghempaskan perekonomian Indonesia ke zona negatif pada kuartal kedua tahun 2020. Menghantam dari sisi konsumsi dan dunia usaha. Tak bisa dihindari, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat.

Sebagai upaya menggerakkan kembali perekonomian nasional, pemerintah menginisiasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha, termasuk bagi para pelaku UMKM selama pandemi Covid-19.

Sebagai bagian dari program PEN, pemerintah merancang penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM, dengan menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askrindo sebagai penjamin. Dengan penjaminan ini, diharapkan lembaga keuangan tidak ragu menyalurkan kredit modal kerja kepada UMKM. Sehingga ekonomi nasional bisa segera bangkit. (*)

Abdul Bari

Pimpinan Redaksi



DAFTAR ISI

BERITA UTAMA

MEDIA JAMKRINDO | JULI 2020



06

KREDIT MODAL KERJA
UMKM DIJAMIN JAMKRINDO

09

AGAR EKONOMI BANGKIT
DI KUARTAL KETIGA

12

SEGERA SALURKAN
KREDIT KE UMKM

14

UMKM CEGAH PHK

16

JAMSYAR JAMIN
PEMBIAYAAN PROGRAM PEN

18

SEDERET INSENTIF
UNTUK MKM

21

KUR TERBUKTI
TINGKATKAN EKONOMI



INFO KORPORASI

- 22 | **DPR SETUJU**
PNM UNTUK BUMN
- 24 | **JAMKRINDO SALURKAN**
HEWAN KURBAN
- 26 | **RANDI ANTO**
CEO TERBAIK
- 28 | **JAMKRINDO TERAPKAN**
SERTIFIKASI ISO 37001:2016
- 30 | **JAMKRINDO RAIH**
PENGHARGAAN ANUGERAH BUMN 2020
- 32 | **DUNIA CETAK REKOR**
1 JUTA KASUS CORONA DALAM 100 JAM



UMKMK & KOPERASI

- 34 | **TINGKATKAN KUALITAS**
RUMAH FLPP
- 36 | **BANTUAN RP 1 TRILIUN**
UNTUK KOPERASI





Kredit Modal Kerja UMKM Dijamin Jamkrindo

PT Jamkrindo ikut terlibat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penjaminan kredit modal kerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini dijalankan pemerintah sebagai stimulus untuk menggerakkan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19.



Penandatanganan kerja sama penjaminan kredit modal kerja di kantor pusat PT Jamkrindo, Kemayoran, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020.

PENANDATANGANAN perjanjian kerja sama dilaksanakan PT Jamkrindo dengan pemerintah lebih dahulu melalui perjanjian kerjasama penjaminan (PKP), kemudian disusul penandatanganan antara PT Jamkrindo dengan bank penyalur kredit modal kerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada Selasa, 7 Juli 2020. Dalam penjaminan kredit modal kerja UMKM ini, pemerintah menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askrindo sebagai penjamin.

Direktur Utama PT Jamkrindo Randi Anto menuturkan, Jamkrindo mendukung penuh program PEN karena perlu percepatan pemulihan ekonomi yang terdampak oleh pandemi Covid-19. "Penugasan pemerintah ini kami jalankan sebaik-baiknya, seperti halnya kami menjamin program kredit usaha rakyat atau KUR yang

sampai saat ini masih terus berlangsung," ujar Randi.

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan dampak negatif bagi perekonomian, termasuk di sektor UMKM antara lain karena pelaku usaha kehabisan modal kerja. Melalui program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah ingin membangkitkan perekonomian lagi melalui penambahan modal kerja atau modal kerja baru. Dengan demikian, pelaku UMKM bisa siap menyambut era new normal.

Plafond kredit modal kerja yang dapat dijamin pada program ini adalah hingga Rp 10 miliar dengan tenor pinjaman hingga tiga tahun. Ada banyak manfaat dari penjaminan kredit modal kerja UMKM dalam program PEN ini. Dari sisi perekonomian, penjaminan kredit modal kerja akan membuat perekonomian terus berputar.



Berita **Utama**

UMKM bisa mendapat kredit modal kerja dengan jaminan dari Jamkrindo.

Sementara, dari sisi produk domestik bruto, akan ada peningkatan karena kegiatan perekonomian pulih lagi.

Melalui program tersebut, ekonomi diharapkan bisa tumbuh lebih cepat. Perputaran kegiatan ekonomi yang perlahan-lahan pulih, diharapkan juga bisa membuka lagi lapangan kerja sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja di sektor formal dan informal.

Selain menjalankan protokol kesehatan untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19, pemerintah juga menginisiasi sejumlah ketentuan untuk memastikan perekonomian tetap berjalan melalui program PEN. Terkait dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah mengeluarkan ketentuan yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang

Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan ketentuan yakni Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.06/2020 tentang Penugasan kepada PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) untuk Melaksanakan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Melalui serangkaian stimulus yang diinsiasi oleh pemerintah dan dukungan dari Lembaga terkait, termasuk kami di perusahaan penjaminan, kami berharap bahwa perekonomian di sektor riil bisa bergerak lagi dan angkatan kerja bisa terserap lebih banyak lagi," ujar Randi. (*)



Perputaran kegiatan ekonomi yang perlahan-lahan pulih diharapkan bisa membuka lagi lapangan kerja sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja di sektor formal dan informal.

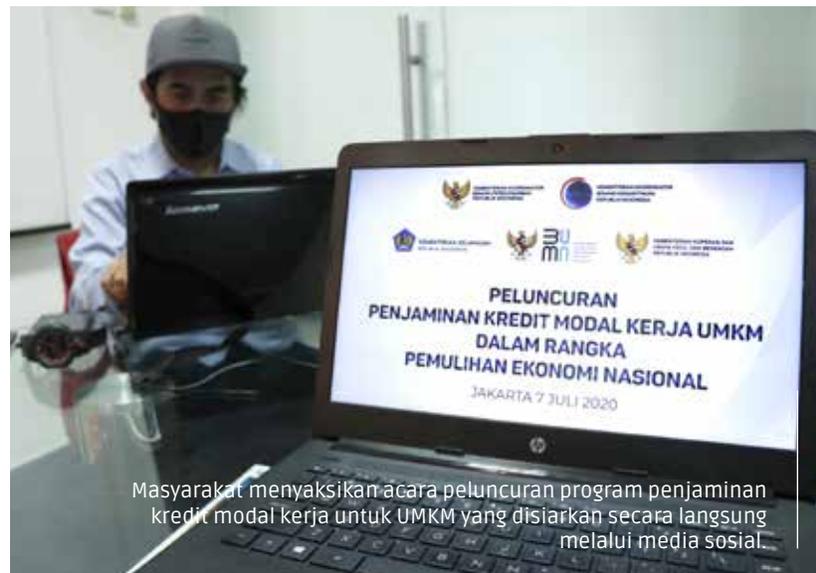


AGAR EKONOMI BANGKIT DI KUARTAL KETIGA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap ekonomi nasional bisa mencatatkan pertumbuhan positif pada kuartal ketiga setelah lesu dihantam pandemi Covid-19. Program kredit modal kerja untuk UMKM yang dijamin oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo menjadi salah satu penggerak roda perekonomian agar segera bangkit.

PROGRAM penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM resmi diluncurkan di Gedung Jamkrindo, Jakarta, pada Selasa, 7 Juli 2020. Peluncuran ditandai dengan penandatanganan kerja sama penjaminan kredit modal kerja antara PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) dengan PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia Agri Niaga (BRI Agro) Tbk., PT Bank BJB Tbk., PT Bank Jatim Tbk., PT Bank Centra Asia (BCA) Tbk., PT Bank Permata Tbk., PT Bank Jateng Tbk., Nobu Bank dan Maybank.

Sedangkan simbolisasi pemberian kredit modal kerja dari bank kepada UMKM dengan jaminan dari PT Jamkrindo dan PT Askrindo diwakili oleh PT Cahaya Gasdom dan PT Subaresta Teknik Indonesia. Acara tersebut dihadiri secara daring oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemitraan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan



Masyarakat menyaksikan acara peluncuran program penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM yang disiarkan secara langsung melalui media sosial.



Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkop UKM Teten Masduki, dan Menteri BUMN Erick Thohir bergabung secara online pada acara peluncuran program penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM.



Berita **Utama**

(OJK) Wimboh Santoso, Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penjaminan kredit modal kerja ini dilakukan pemerintah untuk mendukung dunia usaha terutama UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Menkeu menyebutkan bahwa Pemerintah menganggarkan sebesar Rp 123,46 triliun untuk mendukung sektor UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

“Yang hari ini adalah untuk penjaminan kredit modal kerja. Pemerintah memberikan Rp 5 triliun, sehingga bahkan UMKM yang meminjam sampai Rp 10 miliar, dia premi untuk penjaminan kredit macetnya dibayar oleh pemerintah, dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo,”

ujarnya melalui video yang disiarkan secara langsung.

Selain itu, PT Jamkrindo dan PT Askrindo sendiri diberi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 6 triliun, sehingga keduanya memiliki kemampuan modal untuk meng-cover risiko penjaminannya terhadap UMKM atau debitur.

“Artinya, UMKM kita harap bisa bangkit kembali, diberikan *restructuring*, untuk pinjamannya tidak membayar 6 bulan dari sisi pokoknya, bunganya disubsidi pemerintah. Semakin kecil pinjamannya, subsidi bunganya semakin penuh, semakin agak tinggi sampai menjelang Rp 10 miliar, subsidi bunganya lebih kecil yaitu 2-3%,” ungkapnya.

Selain UMKM yang berada di perbankan, pemerintah juga mendukung UMKM yang berada di bawah lembaga pembiayaan.



PT Jamkrindo dan PT Askrindo sendiri diberi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 6 triliun, sehingga keduanya memiliki kemampuan modal untuk meng-cover risiko penjaminannya terhadap UMKM atau debitur.



Direktur Bisnis Penjaminan PT Jamkrindo Amin Mas'udi (kanan) menandatangani perjanjian kerja sama penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM.

“Semuanya diberikan juga dukungan dalam bentuk restructuring dan subsidi. Kita juga memberikan UMKM yang ada di Pegadaian, yang ada di PNM Mekaar, atau yang ada di ultra mikro koperasi, dan bahkan di dalam Bank Wakaf pun kita cover semuanya,” jelas Menkeu.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan seluruh alokasi *resources*, mendukung dengan policy, memberikan jaminan, memberikan sumber dana yang murah agar ekonomi bergerak.

Menteri Keuangan berharap pada kuartal ketiga, ekonomi Indonesia bisa bangkit sehingga negara tidak lagi dalam zona kontraksi. Dengan dimulainya penjaminan kredit modal kerja ini, ada kepercayaan dimana sektor UMKM hingga korporasi dan sektor perbankan semuanya bisa bergerak. Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat belanja-belanja yang ada di dalam APBN sehingga hal itu juga bisa menambah kebangkitan ekonomi Indonesia agar dapat meningkat di

kuartal ketiga dan keempat.

“Kami di Kementerian Keuangan siap bekerjasama dengan semua institusi, dalam hal ini apakah perbankan, OJK, dan juga dengan seluruh dunia usaha. Sekarang mungkin fokusnya di UMKM, tapi kami akan terus mendukung agar seluruh sektor usaha bisa segera bangkit dan kembali menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia,”

pungkasnya.

Memasuki kehidupan new normal akibat pandemi Covid 19 Pemerintah memang gencar membangkitkan sektor UMKM karena sektor tersebut yang paling terdampak wabah covid-19, sehingga untuk membangkitkan usahanya kembali diperlukan stimulus fiskal lanjutan setelah adanya program restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha. (*)



UMKM produsen sepatu.



UMKM
(USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH)

Berita **Utama**

SEGERA SALURKAN KREDIT KE UMKM



Ilustrasi dana pinjaman untuk modal kerja UMKM.

Pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian dunia terperosok ke dalam resesi. Tidak ada yang mengetahui kapan wabah ini akan berakhir. Namun sebagai tonggak keberlangsungan sebuah negara, perekonomian harus tetap berputar meski pandemi masih terjadi.

DENGAN keadaan new normal di tengah pandemi ini, setiap negara perlahan mulai membangkitkan sektor ekonomi. Akibat wabah Covid-19, berbagai lembaga memprediksi ekonomi global mengalami kontraksi antara 4,9 sampai 7,6 persen.

Pemerintah Indonesia pun mel-

akukan banyak upaya untuk membangkitkan perekonomian. Salah satunya dengan meluncurkan program penjaminan kredit modal kerja bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Hal ini bertujuan agar UMKM bisa bangkit kembali serta bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Adapun

lembaga penjamin yang ditunjuk pemerintah adalah PT Jamkrindo dan PT Askrindo.

Saat ini ada sekitar 60,6 juta UMKM di Indonesia, diharapkan bisa memanfaatkan program kredit modal kerja dari pemerintah yang dijamin oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo.



Pinjaman modal kerja diperkirakan bisa mencapai Rp 100 triliun dengan jangka waktu penyaluran 18 bulan atau hingga tahun 2021. Pada tahun 2020 ini diperkirakan kredit modal kerja yang bisa disalurkan sekitar Rp 65-80 triliun.

"Ini program komplit dari pemerintah untuk UMKM agar bisa bangkit dan bergerak, sehingga pemulihan ekonomi nasional lebih cepat. Sebelumnya sudah ada restrukturisasi kredit pokok dan subsidi bunga, sekarang ada penjaminan, itu semua kita lakukan agar mereka bisa beraktivitas produktif dan aman dari Covid-19 serta menggerakkan perekonomian kita di level akar rumput," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada cara peluncuran penjaminan kredit modal kerja secara virtual di Jakarta, Selasa (7/8).

"Anggaran sebesar Rp 123,46 triliun kita berharap bisa berputar dan betul-betul dinikmati UMKM. Satu, untuk penjaminan kredit modal

kerja. Pemerintah memberikan Rp 5 triliun. Bahkan, UMKM yang meminjam sampai Rp 10 miliar, premi penjaminan kreditnya dibayar oleh pemerintah, dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo," lanjut Sri Mulyani.

Menteri Keuangan berharap seluruh UMKM bisa segera melakukan langkah-langkah tindakan produktif. Peresmian program penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM merupakan langkah maju dalam implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Karena Bapak Presiden ingin melihat minggu depan sudah berapa banyak yang mendapatkan kredit modal kerja dan berapa lagi yang mendapatkan modal kerja. Setiap hari Presiden melihat angka ini karena beliau ingin melihat ekonomi segera bangkit dan itu artinya kesempatan kerja tercipta kembali, kemiskinan bisa turun kembali dan tentu kesejahteraan bisa meningkat," pungkas Sri Mulyani. (*)



Bapak Presiden ingin melihat minggu depan sudah berapa banyak yang mendapatkan kredit modal kerja dan berapa lagi yang mendapatkan modal kerja. Setiap hari Presiden melihat angka ini karena beliau ingin melihat ekonomi segera bangkit.



Menteri Keuangan Sri Mulyani berbincang dengan Presiden Joko Widodo.





UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja.

UMKM CEGAH PHK

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengapresiasi peluncuran program penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM karena bisa menjadi pengungkit untuk menggerakkan ekonomi, sehingga dapat mencegah pertumbuhan ekonomi Indonesia jatuh ke level negatif.

MENURUT Airlangga, sektor UMKM paling terdampak wabah covid-19, sehingga untuk membangkitkan usahanya kembali diperlukan stimulus fiskal lanjutan setelah adanya program restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha.

"UMKM menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi nasional. Setelah UMKM terdampak Covid-19

diberi keleluasaan untuk melakukan restrukturisasi kredit, pemerintah melihat bahwa suntikan modal kerja untuk UMKM menjadi sangat penting," kata Airlangga dalam peluncuran program penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM secara virtual, pada Selasa 7 Juli 2020.

Pemerintah, lanjut Airlangga, melalui Kementerian Keuangan

telah mengalokasikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan (sesuai porsi dukungan yang diberikan), counter guarantee (penjaminan balik), *loss limit*, atau dukungan *risk sharing* lainnya yang dibutuhkan.

Di sisi lain, bank sebagai salah satu penyalur kredit kepada UMKM tetap menerapkan prinsip kehati-





Produk UMKM.

“

UMKM menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi nasional. Setelah UMKM terdampak Covid-19 diberi keleluasaan untuk melakukan restrukturisasi kredit, pemerintah melihat bahwa suntikan modal kerja untuk UMKM menjadi sangat penting.

hatian di tengah resiko tingginya gagal bayar. Di sinilah peran penjaminan kredit sangat diperlukan dimana nantinya kredit modal kerja tersebut akan dijamin pemerintah.

“Oleh karena itu, baik Jamkrindo maupun Askrindo diharapkan secara aktif sudah bisa melaksanakan programnya sehingga modal kerja ini bisa dilakukan perbankan,” tutur Airlangga.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa program penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM dapat mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah menyiapkan tiga program untuk membantu pemulihan sektor UMKM.

“Saya berharap, mari bersama-sama saling bantu dan dukung

supaya program ini jalan, tujuan program ini mencegah terjadinya PHK dan menjadi momentum pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Luhut.

Ia juga mengatakan bahwa di tengah situasi krisis akibat pandemi Covid-19, UMKM membutuhkan realisasi belanja yang cepat dan tepat sehingga menjaga perekonomian nasional. “Kita ingin program ini jalan dengan cepat dan tepat, pemerintah menyusun berbagai stimulus dengan hati-hati mempertimbangkan governance yang ada,” ucapnya.

Selain itu dalam sambutannya Menteri Luhut juga menyampaikan jika Presiden Joko Widodo memerintahkan agar program penjaminan itu diproses dengan cepat, tepat dan sesuai aturan yang berlaku sehingga semua stimulus APBN bisa dirasakan manfaatnya. (*)



Berita **Utama**

JAMSYAR JAMIN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN



Direktur Utama PT Jamkrindo (dua dari kiri) foto bersama direksi perusahaan yang terlibat dalam penjaminan pembiayaan modal kerja syariah di gedung Jamkrindo, Kuningan, Jakarta, Senin, 27 Juli 2020.

PT Jamkrindo Syariah (Jamsyar) yang merupakan anak usaha PT Jamkrindo, ikut terlibat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penjaminan pembiayaan modal kerja yang disalurkan oleh bank-bank syariah. Penjaminan pembiayaan modal kerja ini dilaksanakan bersama dengan PT Askrindo Syariah.

PENANDATANGANAN perjanjian kerja sama pembiayaan modal kerja tersebut dilaksanakan pada Senin, 27 Juli 2020 di Gedung Jamkrindo, Jakarta. Direktur Utama PT Jamkrindo Randi Anto menjelaskan, penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan kelanjutan kerja sama yang sebelumnya telah dilakukan oleh PT Jamkrindo bersama PT Askrindo dengan beberapa bank

umum pada 7 Juli lalu.

Perjanjian kerja sama antara PT Jamkrindo Syariah dan PT Askrindo Syariah dilaksanakan dengan PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BTN Unit Usaha Syariah, PT Bank Jatim Tbk Unit Usaha Syariah, PT Bank Jateng Unit Usaha Syariah, PT Bank BTPN Syariah, dan PT Bank Maybank



Indonesia Unit Usaha Syariah.

Adapun terjamin yang dapat dijamin adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbentuk usaha perorangan dan badan usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Terjamin tersebut dapat menerima pinjaman untuk modal kerja hingga Rp 10 miliar. Selain itu, terjamin juga tidak masuk dalam Daftar Hitam Negara (DHN) serta memiliki pembiayaan dalam kualitas *performing financing* per tanggal 29 Februari 2020.

Direktur Utama PT Jamkrindo Syariah Gatot Suprabowo menuturkan, pihaknya berkomitmen mendukung penuh program PEN yang diinisiasi oleh pemerintah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan ekonomi para pelaku usaha yang terdampak oleh pandemic COVID-19.

“Selain itu, melalui penjaminan pembiayaan modal kerja, kami ingin memastikan agar pelaku UMKM dapat bertahan dan bangkit sehingga dapat berkontribusi pada perekono-

mian Indonesia,” ujar Gatot.

Pandemi Covid-19 berdampak sangat serius terhadap perekonomian Indonesia. Untuk membangkitkan perekonomian, pemerintah mengisiasi program PEN. Salah satu implementasinya adalah penjaminan kredit/pembiayaan modal kerja bagi UMKM melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 tahun 2020.

Untuk melaksanakan program PEN, pemerintah menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk melaksanakan penjaminan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program PEN. Dalam hal pihak terjamin memerlukan fasilitas penjaminan dengan skema syariah, penjaminan dilaksanakan melalui PT Jamkrindo Syariah dan PT Askrindo Syariah.

Hingga Juni 2020, PT Jamkrindo Syariah membukukan volume penjaminan Rp. 15,66 triliun atau meningkat secara YoY sebesar 119,75 persen. Adapun pencapaian Imbal Jasa Kafalah PT Jamkrindo Syariah sebesar Rp 160,35 miliar. Pada posisi Juni 2020 total aset yang di-



Perjanjian kerja sama antara PT Jamkrindo Syariah dan PT Askrindo Syariah dilaksanakan dengan BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BTN Unit Usaha Syariah, Bank Jatim Unit Usaha Syariah, Bank Jateng Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah, dan Maybank Indonesia Unit Usaha Syariah.

miliki PT Jamkrindo Syariah sebesar Rp 1,22 triliun atau tumbuh sebesar 115 % dibandingkan 2019.

“Dengan modal Rp 651,06 miliar atau tumbuh sebesar 116,74 persen dibandingkan 2019, Insya Allah PT Jamkrindo Syariah mampu menjamin pembiayaan program PEN sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor formal dan informal,” tutur Gatot Suprabowo.

Dalam menjangkau potensi pasar, lanjutnya, PT Jamkrindo Syariah senantiasa mengedepankan kepuasan mitra kerja dengan memberikan layanan penjaminan pembiayaan PEN kepada mitra penerima jaminan secara Profesional, Gesit, Responsif, Syar’i, dan Inovatif guna mendukung pertumbuhan perekonomian serta kemashlahatan bersama. (*)



Acara penandatanganan kerjasama penjaminan pembiayaan modal kerja syariah di gedung Jamkrindo, Kemayoran, Jakarta, Senin, 27 Juli 2020.





Ilustrasi insentif untuk UMKM.

SEDERET INSENTIF UNTUK UMKM

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 123,46 triliun sebagai insentif untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

SECARA lebih rinci, total anggaran tersebut untuk subsidi bunga sebesar Rp 35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar Rp 78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp 5 triliun, penjaminan untuk modal kerja sebesar Rp 1 triliun, Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM yang ditanggung pemerintah sebesar Rp 2,4 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM sebesar Rp 1 triliun.

Hingga saat ini, serapan anggaran untuk UMKM baru mencapai 22,74 persen. Jumlah tersebut pun lebih disumbangkan oleh penempatan dana pemerintah ke perbankan yang sudah terealisasi sebesar Rp 30 triliun.

Berikut daftar insentif yang bisa dimanfaatkan langsung oleh pelaku UMKM:

1. PPh final UMKM ditanggung

pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) PMK-44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Dengan adanya aturan tersebut, maka pelaku UMKM dapat mengajukan pembebasan PPh final yang sebesar 0,5 persen.



Untuk diketahui, pelaku UMKM yang ingin mendapatkan insentif dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar atau sesuai dengan PP nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Dengan demikian, wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong pajak tidak melakukan pemotongan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

Untuk bisa mendapatkan insentif tersebut, wajib pajak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara online melalui pajak.go.id dengan menyertakan

Surat Keterangan PP23.

Insentif ini diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020. Pengajuan permohonan insentif dapat dilakukan secara online melalui www.pajak.go.id.

2. Subsidi bunga

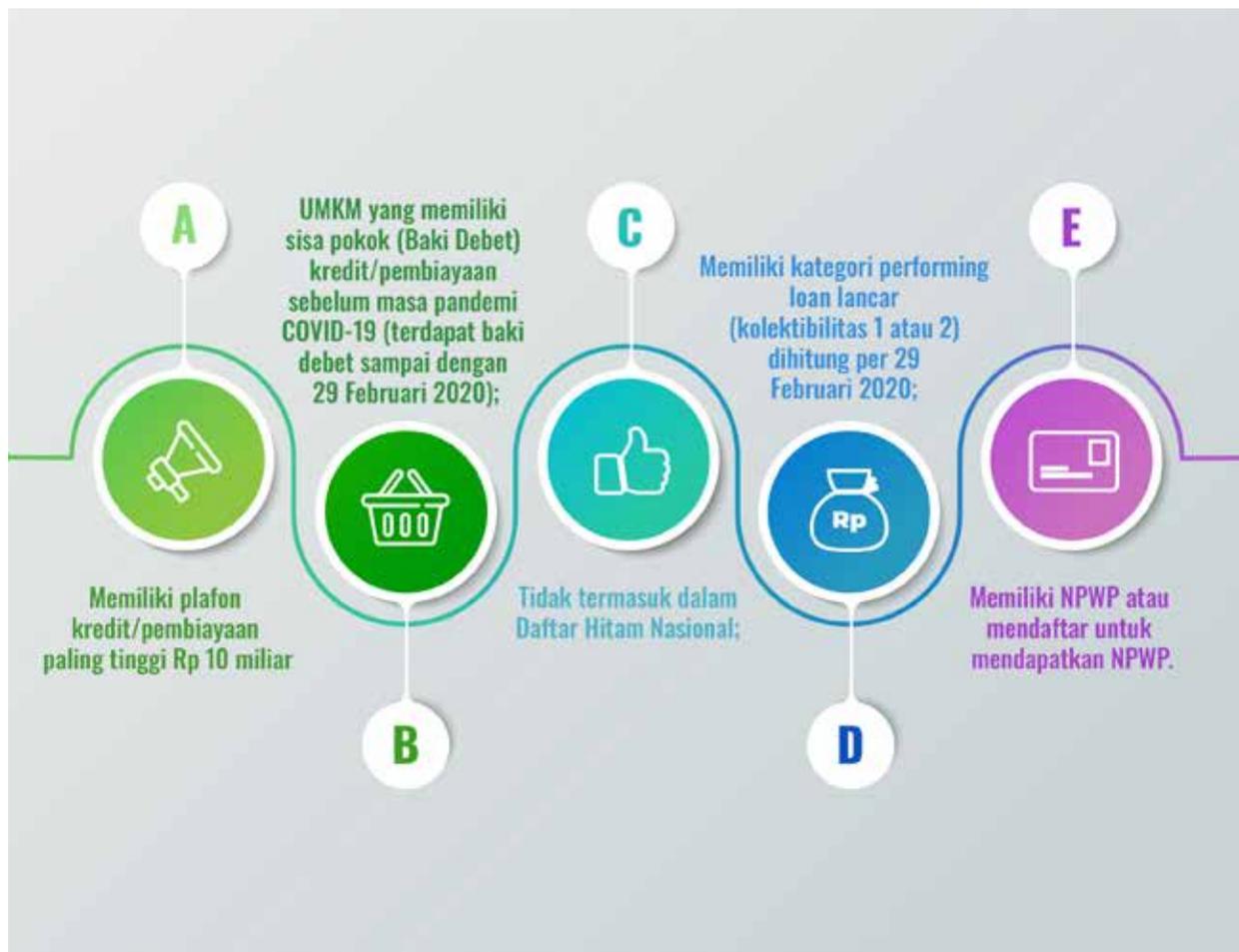
Untuk mendorong kinerja UMKM yang tertekan di tengah pandemi, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha mikro dan kecil (nilai pinjaman maksimal Rp 500 juta) melalui BPR, perbankan ataupun perusahaan pembiayaan.

Lebih rinci, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan diberikan

pemerintah sebesar 6 persen selama tiga bulan pertama, dan 3 persen selama tiga bulan kedua.

Adapun untuk penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha menengah (kredit Rp 500 juta s.d. Rp 10 miliar) melalui BPR, perbankan dan perusahaan pembiayaan sebesar 3 persen selama tiga bulan pertama, dan 2 persen selama bulan kedua.

Kebijakan tersebut makin lengkap dengan terbitnya PMK Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.



Berita **Utama**

Dalam PMK tersebut diatur Kriteria UMKM yang dapat memperoleh subsidi bunga/margin, antara lain:

3. Kredit modal kerja baru

Pemerintah juga menggelontorkan kredit modal kerja baru kepada UMKM dengan nilai maksimal Rp 10 miliar. Kredit modal kerja tersebut bakal disalurkan melalui perbankan, Koperasi, BPR, BMT, maupun Bank Wakaf Mikro.

Kebijakan tersebut diatur dalam pasal 7 ayat 4 dari lampiran PMK No. 71 Tahun 2020. Kategori debitur yang bisa mendapatkan pembiayaan dengan plafon hingga Rp 10 miliar bisa dalam bentuk perseorangan, Koperasi, maupun badan usaha.

Namun demikian, kredit modal kerja baru tersebut hanya diberikan kepada satu penjaminan. Kredit modal kerja tersebut diberikan dengan tenor pinjaman maksimal tiga tahun.

Untuk itu, pemerintah pun telah melakukan penempatan dana di empat bank milik negara, seperti BRI, BNI, BTN, serta Bank Mandiri sebesar Rp 30 triliun.

Dengan total anggaran penempatan dana pemerintah Rp 78,68 triliun, nantinya pemerintah juga akan melakukan penempatan dana di Bank Pendapatan Daerah (BPD) serta bank swasta.

Selain itu, pemerintah juga memberikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 6 triliun kepada dua BUMN penjaminan kredit, PT Askrido (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero). Dengan PMN tersebut diharapkan kedua BUMN memiliki kemampuan modal untuk menjamin risiko dari penyaluran kredit perbankan yang disalurkan ke pelaku UMKM. (Sumber: kompas.com)



Untuk mendorong kinerja UMKM yang tertekan di tengah pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha mikro dan kecil (nilai pinjaman maksimal Rp 500 juta).



UMKM pengrajin rotan.

KUR TERBUKTI TINGKATKAN EKONOMI

Kebijakan memudahkan syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada masa pandemi Covid-19 dan dimulainya aktivitas ekonomi pada era New Normal berdampak positif, ditandai dengan penyaluran KUR yang mulai meningkat signifikan pada minggu kedua Juni 2020.

DATA dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) menunjukkan bahwa BRI lebih fokus melakukan restrukturisasi kredit pada bulan April 2020 (79,4%) dan Mei 2020 (82,7%). Namun sejak minggu ketiga Juni 2020, porsi ekspansi kredit mikro telah mencapai 78,2% dan restrukturisasi hanya tinggal 21,8%.

Bahkan pada akhir minggu ketiga Juni 2020, ekspansi total kredit kecil di BRI telah mencapai lebih dari Rp1 triliun per hari atau dengan kata lain sudah mendekati penyaluran kredit kecil pada masa

normal. Sebagai informasi, BRI adalah bank penyalur terbesar KUR dengan pangsa 64%.

"Diharapkan kondisi tersebut akan terus berlanjut sehingga ekspansi kredit nasional dapat meningkat dan pemulihan ekonomi nasional dapat lebih cepat," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (01/07/2020).

Menko Airlangga menerangkan, Pemerintah terus berupaya menjaga kesehatan masyarakat sekaligus me-

mulihkan ekonomi nasional selama masa pandemi ini. Anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp607,65 triliun pun dimaksudkan untuk menjaga daya beli dan mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Khusus bagi UMKM, dukungan tersebut diberikan dalam bentuk subsidi bunga, insentif pajak dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut khususnya kebijakan KUR, maka Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Ketentuan Khusus bagi Penerima KUR terdampak Pandemi Covid-19.

Dalam Permenko tersebut, diberikan relaksasi penundaan angsuran pokok dan pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya, perpanjangan jangka waktu, penambahan limit plafon dan penundaan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan KUR. (Sumber: kominfo.go.id)



Info **Korporasi**

DPR SETUJU PMN UNTUK BUMN

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rencana tujuh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mendapat penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 23,65 triliun tahun ini.

"KOMISI VI DPR RI menyetujui besaran PMN pada BUMN tahun anggaran 2020 untuk disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI," kata Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu, 15 Juli 2020.

Saat awal rapat, Erick Thohir menjabarkan ada empat BUMN yang akan mendapat PMN. Keempat perusahaan BUMN tersebut, yaitu PT Utama Karya, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia



Komisi VI DPR RI menyetujui besaran PMN pada BUMN tahun anggaran 2020 untuk disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.

atau ITDC dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Namun, selanjutnya diputuskan tiga BUMN mendapatkan PMN juga, yaitu PT Perkebunan Nusantara, Perum Perumnas dan PT Kereta Api



Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta.



Indonesia juga mendapatkan PMN. Semula, ketiga perusahaan tersebut akan diberikan dana talangan saja.

"Kami sepakat kalau dana pinjaman itu kalau memang akan diusulkan jadi dana PMN dengan catatan, bahwa perusahaan yang menerima atau mengubah dana pinjaman menjadi PMN merupakan 100 persen milik negara," ujarnya.

Aria menekankan bahwa PMN tidak digunakan untuk membayar utang tujuh perseroan penerima PMN tersebut.

Adapun detail dana PMN tersebut, yaitu Rp 7,5 triliun untuk Utama Karya, Rp 1,5 triliun untuk PNM, Rp 500 miliar untuk ITDC, Rp 6 triliun untuk PT BPUI, Rp 4,01 triliun untuk PTPN, Rp 650 miliar untuk Perumnas dan Rp 3,5 triliun untuk PT KAI.

Sementara itu, pemerintah menerbitkan tiga Peraturan Pemerintah (PP) berbeda terkait PMN yang diberikan kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, PT Utama Karya (Persero) atau HK dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Penempatan PMN kepada PNM senilai Rp 1,5 triliun. Hal ini tertuang dalam PP Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 6 Juli 2020.

Kemudian dalam PP Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Utama Karya.

Lalu untuk PLN, hal ini tertuang dalam dua PP berbeda yakni PP

Nomor 36 dan 37 Tahun 2020. Total PLN mendapatkan PMN senilai Rp 9,63 triliun.

Dalam PP Tahun 2020 disebutkan bahwa PMN ini dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bersumber dari APBN 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1999/2000 dan 2000-2015 senilai total Rp 4,63 triliun dan Rp 5 triliun lainnya dari APBN 2020.

Tahun depan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah mengajukan anggaran PMN untuk perusahaan pelat merah pada 2021 senilai Rp 70 triliun.

Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan penyertaan modal dari negara ini kepada perusahaan BUMN diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan lapangan kerja, khususnya bagi UMKM.

"Masih sekitar 70-an [Rp 70 triliun] lah tapi sekali lagi kita melihat banyak belanja-belanja kementerian yang masih bisa dialokasikan untuk terciptanya berbagai pertumbuhan atau lapangan-lapangan kerja khususnya yang UMKM karena ini yang memberikan kontribusi hampir 57% terhadap PDB," kata Aria. (Sumber: tempo.co/cnbc Indonesia)



Tahun depan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah mengajukan anggaran PMN untuk perusahaan pelat merah pada 2021 senilai Rp 70 triliun.



Menteri BUMN Erick Thohir rapat di DPR.



Info **Korporasi**

JAMKRINDO SALURKAN HEWAN KURBAN



Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jamkrindo Aribowo (kanan) dan Sekretaris Perusahaan Jamkrindo Abdul Bari (dua dari kanan) menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat.

Dalam rangka Hari Raya Idul Adha, PT Jamkrindo menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat terdampak Covid-19. Tidak seperti biasanya yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban di kantor pusat, kali ini Jamkrindo menyalurkan hewan kurban di beberapa masjid, yayasan, lembaga masyarakat, pondok pesantren, kelurahan yang tersebar di Jabodetabek, serta beberapa kota di Jawa dan luar Jawa serta masyarakat sekitar kantor untuk mengikuti protokol kesehatan.

ADAPUN jumlah hewan kurban yang disalurkan sebanyak 19 ekor sapi dan 20 ekor kambing senilai Rp 541.691.000 yang berasal dari Bina Lingkungan PT Jamkrindo, Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera, Jumat

Berbagi Jamkrindo, UPZ Jamkrindo, DKM Jamkrindo, dan insan Jamkrindo.

Direktur Utama Jamkrindo Randi Anto mengatakan Covid-19 telah berdampak kepada kesejahteraan

masyarakat. Untuk itu, ibadah kurban tahun ini bisa dimaknai lebih dalam oleh seluruh jajaran PT Jamkrindo dan masyarakat.

"Ibadah kurban ini merupakan wahana untuk mengasah rasa empati





Perwakilan Jamkrindo menyerahkan hewan kurban kepada Yayasan Gumi Suci Lestari.



Kepedulian kepada sesama ini penting sekali ditumbuhkan dalam setiap pribadi. Untuk itu, kami sangat mendorong para karyawan melakukan ibadah kurban, serta yang terpenting dapat mengambil hikmah dari simbolik ibadah kurban.

manusia untuk senantiasa peduli terhadap sesama dan meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim A.S," kata Randi Anto dalam siaran pers, Jumat, 31 Juli 2020.

Lebih lanjut, Randi Anto mengatakan bahwa selain ibadah, kurban juga mengandung manfaat ekonomi yang besar. Untuk itu, dia mengajak seluruh karyawan Jamkrindo untuk meningkatkan lagi kepedulian sosialnya membantu masyarakat terutama di masa pandemi seperti saat ini.

"Jamkrindo secara aktif telah terlibat dalam sejumlah kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kepedulian kepada sesama ini penting sekali ditumbuhkan dalam setiap pribadi. Untuk itu, kami sangat mendorong para karyawan melakukan ibadah kurban, serta yang terpenting dapat mengambil hikmah dari simbolik ibadah kurban," tutur dia.

Hewan kurban disalurkan melalui Masjid Al Jannah An Naim (Bekasi), Mushola At-Tauloh Bogor,

Ponpes Tanbihul Ghoflin, Masjid Al Huda Citayem, Masjid Babussalam Setu Bekasi, Masjid As Shilihin Cepu Blora, Masjid An-nur Pademangan, BAZNAS, Pesantren Hidayatullah Kupang, Masjid Jami Al Qorieb JL. Petojo Utara 1 Jakarta Pusat, Masjid Al Ikhlash JL. Pegangsaan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara, YPB Al Mustaqim Jawa Barat, Yayasan Al Iqdam Jawa Barat, Daris Foundation, Cahaya Ilahi Serang Banten. Selain itu juga diserahkan ke Yayasan Gumi Suci Lestari di Denpasar serta Masjid Baitul Awal Macanmati Ngrampal Sragen Jawa Tengah.

Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jamkrindo Aribowo menambahkan, kegiatan kurban ini merupakan bukti nyata komitmen dan kepedulian perusahaan dan insan Jamkrindo yang senantiasa hadir dan berbagi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan lingkungan.

Meski berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, perayaan ini tidak mengurangi makna dari Idul

Adha, yaitu hikmah vertikal dan hikmah horizontal. Hikmah vertikal yaitu semakin dekatnya kepada Allah SWT dan hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi. "Semoga ini menjadi berkah, bermanfaat bagi semua pihak, dan berkesinambungan," ujar kata Aribowo.

Jamkrindo adalah perusahaan penjaminan yang saat ini merupakan anggota *holding* Asuransi dan Penjaminan dengan induk *holding* PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Sebagai perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia, Jamkrindo berkomitmen untuk senantiasa memberikan penjaminan bagi para mitra perbankan dan lembaga keuangan nonbank.

Sebagai perusahaan penjaminan terbesar di seluruh Indonesia, Jamkrindo bertekad untuk terus meningkatkan kontribusinya untuk bangsa dan UMKMK yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. (*)



RANDI ANTO

CEO TERBAIK



Direktur Utama PT Jamkrindo, Randi Anto

Pandemi Covid-19 melahirkan tantangan yang sangat besar bagi dunia bisnis di tingkat global maupun nasional. Pada kondisi ini, CEO diuji kemampuannya sebagai sosok pemimpin yang mampu menavigasi perusahaan untuk bisa bertahan dan bertumbuh di tengah tantangan perekonomian.



ICONOMICS Research bekerja sama dengan RRI memberikan penghargaan kepada para CEO yang dinilai berhasil membawa perusahaan *survive* di tengah pandemi Covid-19 lewat penghargaan *Best CEO – Employees' Choice Awards 2020*.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama Jamkrindo, Randi Anto menerima penghargaan atau apresiasi sebagai *The Best CEO 2020* Kategori *Guarantee* dan *Insurance*. Ajang Penghargaan tersebut dilakukan dalam sesi virtual yang berlangsung pada Kamis, 23 Juli 2020.

Secara terpisah, Randi Anto berterima kasih atas apresiasi yang diberikan. Dia mengatakan penghargaan tersebut diperoleh

berkat dukungan segenap insan Jamkrindo. Dalam menghadapi ketidakpastian akibat dari pandemi covid-19, ia menyadari tantangan ke depan semakin meningkat, terlebih Jamkrindo dipercaya untuk terlibat dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Ia berharap soliditas segenap insan perusahaan akan menjadi kekuatan utama Jamkrindo ke depannya.

"Dalam menjalankan peran yang besar ini dibutuhkan upaya luar biasa dari segenap insan Jamkrindo. Soliditas antar elemen perusahaan diperlukan untuk bisa melangkah mencapai tujuan bersama," ujar dia.

Penghargaan Best CEO 2020 ini disusun dengan mempertimbangkan seluruh aspek kepemimpinan secara komprehensif. Iconomics melakukan studi untuk mengukur sejauh mana

upaya-upaya profesional dari CEO untuk mengangkat derajat perusahaan mendapat apresiasi dari para staf, baik dalam situasi normal maupun situasi sulit seperti yang sedang terjadi saat ini akibat pandemi berkepanjangan. Popularitas dan dukungan kepemimpinan dari seluruh staf ini tercermin dari penilaian Best CEO 2020.

Penilaian dilakukan dengan melakukan survei terhadap staf industri dan kategori, dengan total responden mendekati 10.000 (kumulatif) pada awal Juni 2020. Terdapat lebih dari 200 CEO yang diikutsertakan dalam survei ini. Adapun kategori penilaian para pimpinan perusahaan ini disusun berdasarkan sejumlah parameter, yakni *Popularity*, *Competency*, *Personality*, dan *Crisis Leadership*. (*)





Closing meeting Sertifikasi ISO 37001:2016 di kantor pusat Jamkrindo pada Jumat, 17 Juli 2020.

JAMKRINDO TERAPKAN SERTIFIKASI ISO 37001:2016

PT Jamkrindo berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) melalui penerapan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam kegiatan perusahaan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pekerjaan.

DIREKTUR MSDM, Umum, dan Kepatuhan Sulis Usdoko dalam *closing meeting* Sertifikasi ISO 37001:2016 di kantor Pusat Jamkrindo pada Jumat, 17 Juli 2020 mengatakan bahwa implementasi ini bertujuan untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tentunya penerapan ini juga sebagai wujud peran aktif dalam mencegah praktik



Implementasi ini bertujuan untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





KKN di perusahaan.

“ISO 37001:2016 menjadi standar pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka mengendalikan dan mengantisipasi praktik penyuapan di perusahaan, membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal, dan penguatan keamanan perusahaan melalui efektivitas penerapan kebijakan anti penyuapan,” ujarnya.

Komitmen ini merupakan tindak lanjut dari hasil rekomendasi hasil Audit Lembaga Sertifikasi (SAI Global). Mengingat kompleksitas proses bisnis, mitra bisnis yang beragam, jangkauan bisnis yang luas, dan untuk menjaga perusahaan tetap dalam jalur GCG, diperlukan SMAP secara intensif dan regular kepada seluruh insan perusahaan.

Sulis Usdoko menjelaskan, perusahaan akan memperluas ruang lingkup sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP ke seluruh unit kerja di seluruh kantor cabang PT Jamkrindo di seluruh Indonesia. “Untuk tahap awal, sudah dilakukan *pilot project* SMAP di unit kerja Sekretaris Perusahaan, Divisi Umum, serta Divisi Keuangan & Investasi,” ujarnya.

Standar yang diterbitkan oleh ISO pada tanggal 15 Oktober 2016 ini bertujuan untuk memberi kepastian pada organisasi bahwa sistem anti penyuapan yang diterapkan telah mencakup prosedur yang memadai terhadap potensi penyuapan dan korupsi. Standar yang merupakan sertifikasi internasional terhadap sistem anti penyuapan ini diadopsi dan diterjemahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai SNI ISO 37001:2016 dengan SK Penetapan bertanggal 6 Desember 2016.

ISO 37001 terdiri atas 10 klausul dengan menerapkan standar dokumen sistem manajemen Annex

SL. Standar dokumen ini selaras dengan berbagai standar lain yang telah dikeluarkan oleh ISO, seperti ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Kesamaan ini memudahkan integrasi ISO 37001 dengan standar-standar lain tersebut.

ISO 37001 mendefinisikan “penyuapan” sebagai tindakan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apa pun (berupa keuangan atau nonkeuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut. Kesesuaian dengan standar ini tidak menjamin penyuapan tidak akan terjadi, tetapi standar ini dapat membantu organisasi menerapkan rancangan yang wajar dan proporsional untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyuapan. (*)



Standar yang diterbitkan oleh ISO pada tanggal 15 Oktober 2016 ini bertujuan untuk memberi kepastian pada organisasi bahwa sistem anti penyuapan yang diterapkan telah mencakup prosedur yang memadai terhadap potensi penyuapan dan korupsi.



Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan PT Jamkrindo, Sulis Usdoko.

Info **Korporasi**

JAMKRINDO RAIH PENGHARGAAN ANUGERAH BUMN 2020

PT Jamkrindo mendapatkan penghargaan terbaik II pada kategori Emerging Stated Owned Enterprise dalam acara 9th Anugerah BUMN 2020. Penghargaan diterima oleh Direktur Operasional dan Jaringan PT Jamkrindo Kadar Wisnuwarman di Jakarta, Kamis (9/7/2020) malam.

DIREKTUR Utama PT Jamkrindo Randi Anto mengatakan, penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dan menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus memberikan layanan terbaik. "Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerja perusahaan yang selama ini telah memberikan pelayanan terbaik untuk penjaminan kredit UMKM," kata Randi Anto dalam siaran pers.

PT Jamkrindo yang berusia 50 tahun pada



Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerja perusahaan yang selama ini telah memberikan pelayanan terbaik untuk penjaminan kredit UMKM



Direktur Operasional dan Jaringan PT Jamkrindo, Kadar Wisnuwarman (Kiri) menerima penghargaan.





Pada tahun 2020 Jamkrindo mengalami dua perubahan badan hukum, dari Perum Jamkrindo ke PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero), lalu berubah menjadi PT Jamkrindo yang menandai masuknya perusahaan ke dalam entitas Holding Asuransi dan Penjaminan.

1 Juli 2020 terus berkomitmen untuk meningkatkan dukungan bagi para pelaku UMKM dan Koperasi. Randi melanjutkan, PT Jamkrindo juga mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk terlibat dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya untuk menjamin kredit modal kerja.

Jamkrindo berkomitmen menyukseskan program tersebut karena yang dirancang untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. "Kami yakin bahwa program ini baik bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, serta memberikan prospek bagi pengembangan bisnis Jamkrindo ke depan," ujar Randi Anto.

Pada tahun 2020 Jamkrindo mengalami dua perubahan badan hukum, dari Perum Jamkrindo ke PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero), lalu berubah menjadi PT Jamkrindo

yang menandai masuknya perusahaan ke dalam entitas Holding Asuransi dan Penjaminan.

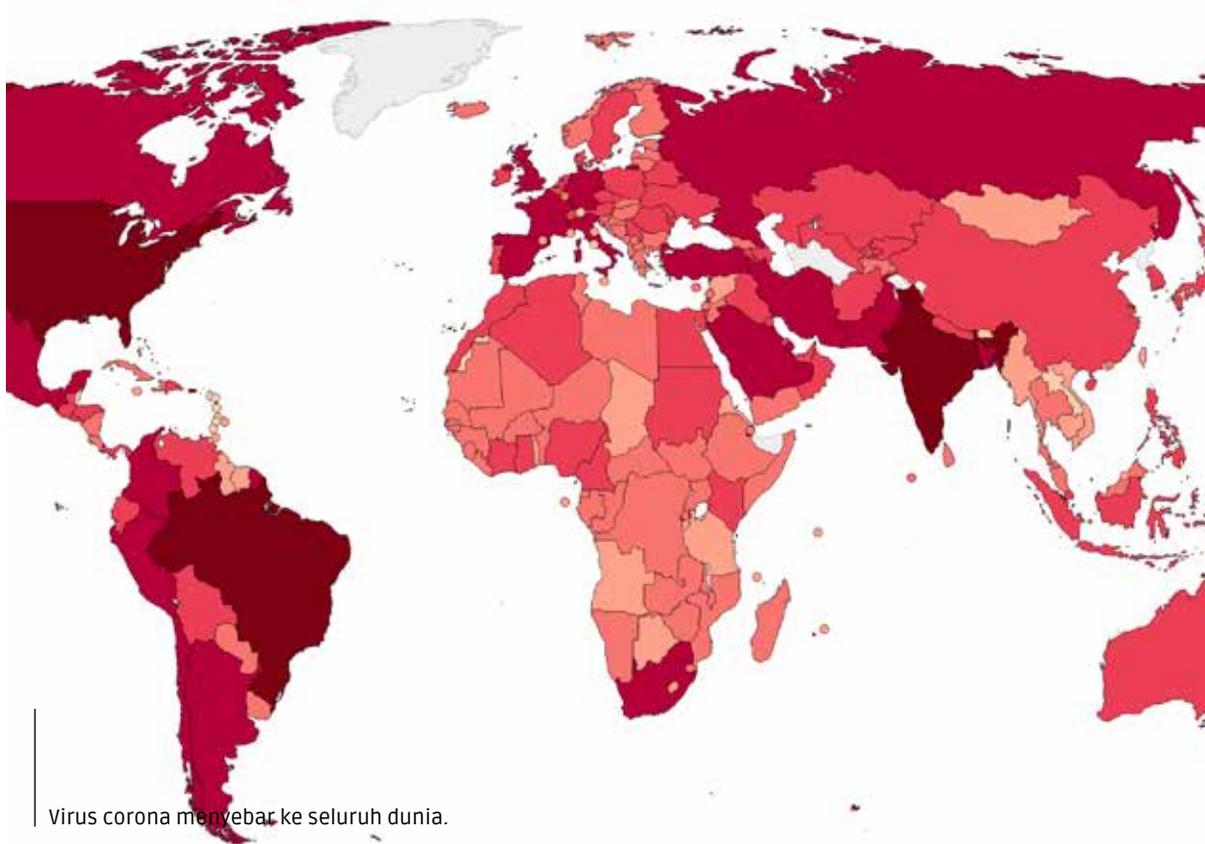
Anugerah BUMN 2020 yang memasuki tahun ke-9 merupakan ajang untuk mengapresiasi kontribusi BUMN yang telah menunjukkan kinerja unggul serta mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Mengusung tema "BUMN sebagai Lokomotif Perekonomian

Nasional dalam Persaingan Global", kriteria penilaian difokuskan pada kinerja korporasi BUMN dan Anak Perusahaan BUMN sepanjang tahun 2019. Didukung oleh tim riset dari PPM Manajemen, proses penilaian Anugerah BUMN 2020 yang awalnya diikuti oleh 131 perusahaan mengerucut menjadi 107 perusahaan yang lolos tahap wawancara dan presentasi di hadapan para dewan juri. (*)



Ilustrasi penghargaan.





Virus corona menyebar ke seluruh dunia.

DUNIA CETAK REKOR

1 JUTA KASUS CORONA

DALAM 100 JAM

Total kasus virus Corona (COVID-19) di dunia telah menembus angka 14 juta kasus. Untuk pertama kalinya, rekor dunia tercetak dengan munculnya 1 juta kasus Corona secara global di bawah waktu 100 jam.

SEPERTI dilansir Reuters, Sabtu (18/7/2020), kasus pertama Corona dilaporkan di kota Wuhan, China, pada awal Januari lalu dan dibutuhkan waktu tiga bulan untuk mencapai total 1 juta kasus Corona secara global.

Pada bulan Juli ini, menurut penghitungan Reuters, dibutuhkan waktu hanya empat hari atau 96 jam untuk mencapai total 14 juta kasus Corona dari sebelumnya total 13 juta kasus yang tercatat pada 13 Juli lalu.

Amerika Serikat (AS), yang sejauh ini mencatat lebih dari 3,6 juta

kasus Corona, mengalami lonjakan kasus yang besar setiap harinya dalam gelombang pertama virus Corona yang masih merajalela. Pada Kamis (16/7) waktu setempat, AS melaporkan 77 ribu kasus Corona dalam sehari.

Pandemi Corona telah menewaskan lebih dari 590 ribu orang secara global, dalam waktu tujuh bulan terakhir. Kematian pertama akibat Corona dilaporkan terjadi pada 10 Januari di Wuhan, China, sebelum virus ini menyebar luas ke berbagai negara.

Penghitungan Reuters yang

didasarkan pada laporan pemerintah berbagai negara, menunjukkan bahwa virus Corona meningkat dengan cepat di benua Amerika. Lebih dari separuh total kasus dan total kematian terjadi di benua Amerika.

Di Brasil, lebih dari 2 juta orang dinyatakan positif Corona, termasuk Presiden Jair Bolsonaro. Lebih dari 76 ribu orang meninggal dunia akibat virus Corona di negara ini. Dengan angka ini, Brasil menempati posisi kedua sebagai negara dengan total kasus dan total kematian terbanyak di dunia, setelah AS.

India menjadi negara ketiga,





Kasus positif virus corona terbanyak di Amerika Serikat.



Pasien Covid-19 dibawa dengan ambulance



Laporan terbaru WHO menyebut 237.743 kasus Corona dilaporkan secara global hanya dalam 24 jam terakhir. Angka itu mencetak rekor tertinggi untuk tambahan kasus dalam 24 jam, setelah rekor sebelumnya tercetak pada Minggu (13/7) lalu dengan 230.370 kasus Corona dalam sehari.

setelah AS dan Brasil, yang total kasus Corona-nya menembus angka 1 juta. Negara ini melaporkan rata-rata 30 ribu kasus Corona setiap hari dalam sepekan terakhir.

Ketiga negara itu menjadi penggerak utama di balik laporan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat (17/7) waktu setempat, yang menyebut tambahan kasus harian global kembali mencetak rekor tertinggi.

Laporan terbaru WHO menyebut

237.743 kasus Corona dilaporkan secara global hanya dalam 24 jam terakhir. Angka itu mencetak rekor tertinggi untuk tambahan kasus dalam 24 jam, setelah rekor sebelumnya tercetak pada Minggu (13/7) lalu dengan 230.370 kasus Corona dalam sehari.

Menurut data penghitungan Johns Hopkins University (JHU), total 14.041.508 kasus Corona kini tercatat secara global, dengan total kematian global mencapai 600.751 orang. (Sumber: detik.com)



TINGKATKAN KUALITAS RUMAH FLPP

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengimbau bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) memperhatikan kualitas rumah subsidi, dan tidak terlalu fokus pada kuantitas penyaluran pembiayaan.



DIREKTUR Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin mengatakan, bank penyalur FLPP harus memperhatikan kualitas rumah, dan menjamin ketersediaan pasokan. "Bicara masalah kuantitas sangat mudah tapi yang dibutuhkan adalah kualitas rumah," kata Arief dalam keterangan tertulis, dilansir dari Antara, Sabtu (25/7).

PPDPP juga meminta agar saat mengajukan penambahan kuota, bank penyalur FLPP harus bisa memberikan kepastian apakah ada permintaan, serta pasokan rumah dari pengembang. Arief menjelaskan, bank pelaksana FLPP harus bisa memastikan bahwa permintaan pembiayaan rumah subsidi harus bisa diwujudkan oleh pengembang.

(PPDPP) telah melakukan evaluasi penyaluran pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang semester I 2020. Tahun ini, PPDPP menggandeng 42 Bank Pelaksana yang terdiri dari 10 bank

nasional dan 32 bank pembangunan daerah (BPD) dalam menyalurkan FLPP yang dianggarkan Rp 11 triliun tahun ini.

Arief Sabaruddin mengatakan, bank pelaksana yang belum melaksanakan penyaluran dana FLPP sesuai dengan target yang disepakati di dalam perjanjian kerjasama kuotanya akan dialihkan kepada bank pelaksana dengan kinerja yang lebih bagus.

Hasil dari penilaian, terdapat 13 bank pelaksana yang terdiri dari 3 bank nasional dan 10 BPD dengan pencapaian hingga 80% (high level) sepanjang Januari-Juni 2020. Sebanyak 15 bank pelaksana yakni 3 bank nasional dan 12 BPD dengan capaian nilai 50%-80%. Dan sisanya 14 bank yang terdiri

dari 4 bank nasional dan 10 BPD hanya memperoleh nilai capaian di bawah 50%

Direktur Layanan PPDPP, Christ Robert Marbun, bobot penilaian yang dilakukan kepada 42 bank pelaksana memenuhi empat hal indikator terkait dengan indikator keuangan dengan porsi terbesar mencapai hingga 40%, indikator pencapaian bank dengan 30%, indikator operasional sebesar 25% dan sisanya penilaian atas indikator implementasi host to host sebesar 5%.

"Penilaian yang dilakukan mempertimbangkan kepatuhan dari bank pelaksana terhadap rekonsiliasi data, jadwal angsuran, penyaluran dana dan dukungan terhadap peminatan dan evaluasi lapangan serta

keaktifan bank pelaksana dalam menindaklanjuti setiap peningkatan teknologi yang diterapkan oleh PPDPP," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7).

PPDPP akan mengurangi kuota minimal 20% bagi bank pelaksana dengan realisasi di bawah 50. Penambahan kuota hanya dapat dilakukan kembali jika bank sudah mampu menyalurkan dana FLPP di atas 80%.

Hingga 24 Juli 2020, penyaluran FLPP sudah mencapai 77.401 unit atau senilai Rp 7,85 triliun. Itu sebesar 75,51% dari target yang ditetapkan tahun 2020. Sehingga total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 – 2020 mencapai 733.003 unit senilai Rp52.21 triliun. (Berbagai sumber)

Bicara masalah kuantitas sangat mudah tapi yang dibutuhkan adalah kualitas rumah.



Ilustrasi rumah FLPP.

UMKM & Koperasi

Bantuan Rp 1 Triliun untuk Koperasi

Presiden Joko Widodo memerintahkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-UMKM) untuk segera mencairkan dana tambahan sebesar Rp 1 triliun untuk koperasi. Dana tersebut nantinya akan disalurkan kembali kepada pelaku UMKM dalam bentuk modal kerja.



Presiden Joko Widodo bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

"SAYA senang tadi bahwa disiapkan oleh LPDB Rp1 triliun. Betul Pak Dirut? ini segera diberikan kepada koperasi-koperasi yang baik agar dari koperasi juga diberikan kepada anggota-anggotanya pelaku-pelaku usaha secepat-cepatnya," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7).

Jokowi juga berpesan kepada koperasi-koperasi yang ada untuk tidak memberikan bunga pinjaman yang tinggi kepada pelaku UMKM. Bantuan berupa modal kerja produktif ini akan disalurkan kepada 12 juta pelaku UMKM pada Agustus mendatang, senilai Rp381 miliar. Mantan Gubernur Jakarta ini berharap bantuan modal ini

“

Saya senang tadi bahwa disiapkan oleh LPDB Rp1 triliun. Ini segera diberikan kepada koperasi-koperasi yang baik agar dari koperasi juga diberikan kepada anggota-anggotanya pelaku-pelaku usaha secepat-cepatnya.

kerja ini bisa mendongkrak perekonomian Tanah Air di kuartal-III mendatang.

"Kita harapkan juga akan mengungkit ekonomi kita. Total nilainya yang diberikan tadi disampaikan Bapak Menteri Koperasi kurang lebih Rp381 miliar. Saya kira ini jangan berhenti. Besok tambah lagi,



Koperasi menyalurkan pinjaman ke anggota.

besok tambah lagi, minggu depan tambah lagi, minggu depan tambah lagi sehingga koperasi-koperasi yang kita miliki betul-betul likuiditas baik," jelasnya.

Selain stimulus kepada koperasi dan UMKM, Jokowi melihat stimulus seperti bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat sudah mulai berpengaruh terhadap kenaikan konsumsi masyarakat walaupun belum signifikan.

"Saya senang bahwa sudah ada angka-angka yang baik. Konsumsi sudah mulai terungkit naik. artinya mungkin peredaran uang yang ada di bawah karena ada BLT Desa, ada bansos tunai, ada bansos sembako itu akan sangat mempengaruhi daya beli dan konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat. Saya juga melihat aktivitas ekspor juga tren-nya naik dibanding bulan Mei, dibanding bulan Juli. Ini juga baik." paparnya.

Menurut Jokowi semua pihak

harus bergegas menyalurkan berbagai stimulus dan bantuan agar perekonomian Indonesia tidak anjlok lebih dalam lagi seperti yang terjadi di negara-negara lain. "Kita hanya punya waktu untuk ungkitan ini Juli-Agustus-September. Kalau kita bisa mengungkit ini, Insya Allah nanti di kuartal-IV lebih mudah, tahun depan kita akan jauh lebih mudah," imbuhnya.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menjelaskan pihak LPDB telah menyiapkan tiga fase pemulihan koperasi di tengah masa pandemi ini. Pertama, fase program survival. Pada fase ini pihaknya telah melakukan strukturisasi pinjaman kepada mitra LPDB dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan jasa selama 12 bulan.

Sampai saat ini, tambah Teten 40 mitra koperasi telah direstrukturisasi dengan fasilitas penundaan pokok, penundaan jasa, pengurangan jasa, perpanjangan waktu dan



Kita harapkan juga akan mengungkit ekonomi kita. Total nilainya yang diberikan tadi disampaikan Bapak Menteri Koperasi kurang lebih Rp381 miliar. Saya kira ini jangan berhenti. Besok tambah lagi, besok tambah lagi, minggu depan tambah lagi, minggu depan tambah lagi sehingga koperasi-koperasi yang kita miliki betul-betul likuiditas baik.



UMKM & Koperasi



Ilustrasi Koperasi.

penambahan fasilitas pinjaman atau pembiayaan dengan total *out-standing* sebesar Rp135,7 miliar.

"Dalam program ini LPDB juga tidak mengenakan bunga selama masa penundaan pembayaran sehingga secara langsung ini merupakan subsidi bunga dari LPDB sebesar 100 persen selama satu tahun," ungkap Teten.

Kedua, fase program pemulihan ekonomi dengan alokasi tambahan sebesar Rp1 triliun. Pembiayaan ini, ujar Teten khusus disalurkan kepada koperasi dengan bunga tiga persen, menurun atau sekitar 1,5 persen flat per tahun untuk menjangkau sekitar 4,8 juta UMKM anggota koperasi.

Sampai saat ini, LPDB telah menyalurkan pinjaman atau pembiayaan baru dengan total pencairan sebesar Rp381,4 miliar. "Dengan rincian untuk koperasi pola konvensional sebesar Rp21,8 miliar, ini ada 13 mitra. Lalu dengan pola syariah sebesar Rp109 miliar atau ada 21 mitra," paparnya.

“

**Hingga saat ini tercatat
ada 123.048 unit
koperasi dengan total
anggota sebanyak 22
juta orang dengan total
aset mencapai Rp152
triliun dan omset
sebesar Rp152 triliun.**

Fase terakhir adalah fase program penumbuhan ekonomi. Pada fase ini, pihaknya telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk memudahkan akses pembiayaan koperasi dan UKM dengan bunga ringan dan pendampingan.

"Dari *exercise* kami dengan koperasi simpan pinjam, koperasi BMT (syariah) kami ke depan melihat bahwa para koperasi ini bisa menjadi mitra pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan yang murah dan mudah untuk UMKM," katanya.

Dalam kesempatan ini, Teten juga melaporkan kepada Presiden bahwa hingga saat ini tercatat ada 123.048 unit koperasi dengan total anggota sebanyak 22 juta orang dengan total aset mencapai Rp152 triliun dan omset sebesar Rp152 triliun.

Dari jumlah koperasi tersebut, sebanyak 59 persen merupakan koperasi konsumen, koperasi produsen 19 persen, koperasi simpan pinjam 13 persen, koperasi jasa 4,85 persen dan koperasi pemasaran 2,6 persen. Sumber: (VOA Indonesia)



E-MAGAZINE

KINI MEDIA JAMKRINDO
HADIR DALAM BENTUK DIGITAL

**BURUAN
DOWNLOAD APLIKASI
KAMI**



AVAILABLE ON





solusi
UMKMK
Menuju
SUKSES



Produk Kami

- | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|---|--|
| PENJAMINAN KREDIT UMUM | PENJAMINAN KIR | PENJAMINAN PEMBELYAN BARANG | PENJAMINAN PROGRAM | PENJAMINAN RETROGRAD BARANG | PENJAMINAN KEAGIHAN KARGO |
| PENJAMINAN SUPPLY CHAIN FINANCING | CUSTOM BOND | SURETY BOND | PENJAMINAN KREDIT MIKRO | PENJAMINAN BANK GARANSI / KONTROL BARANG | PENJAMINAN FINTECH |
| PENJAMINAN KREDIT MULTI DUNA | PENJAMINAN PEMBELYAN KEWASHTAWAN BARANG | PENJAMINAN PEMBELYAN BANGUNAN | PENJAMINAN KREDIT KONSTRUKSI DAN PEMBELYAN BARANG & JASA | PENJAMINAN RPH | PENJAMINAN SISTEM RISIKO BUDIDAYA |